

## **BAB 7 PENUTUP**

Bab 7 ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan implikasi teoritis. Kesimpulan berisi temuan-temuan penelitian dari studi kasus terhadap empat gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu: HMI, KAMMI, FORKOT dan FKSMJ, dan dua gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, yaitu: BEMI dan BEMSI. Sedangkan implikasi teoritis berisi tentang klarifikasi dan konfirmasi teori-teori yang digunakan dalam studi ini. Kesimpulan penelitian mengacu pada tiga pokok pertanyaan penelitian mengenai: (1) sebab-sebab terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa; (2) pengaruh kepentingan politik dan ideologi mahasiswa dan elit politik dalam polarisasi gerakan mahasiswa; (3) peran elit politik terutama elit partai politik dalam gerakan politik mahasiswa.

### **7.1. Temuan Penelitian**

Penelitian terhadap empat kasus gerakan mahasiswa pada masa Presiden B.J. Habibie, yaitu: HMI, KAMMI, FORKOT dan FKSMJ, dan dua kasus gerakan mahasiswa pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu: BEMI dan BEMSI mengungkap bahwa gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI merupakan gerakan politik. Sedangkan sebab-sebab terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa, yaitu antara HMI-KAMMI dan FORKOT-FKSMJ pada masa Presiden B.J. Habibie dan antara BEMI dan BEMSI pada masa Presiden Abdurrahman Wahid ada tiga, yaitu: (1) persepsi yang berbeda terhadap personal B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid; (2) persepsi yang berbeda terhadap kebijakan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid selaku Presiden; (3) kepentingan politik dan ideologi yang masuk melalui dukungan —politik, ekonomi dan psikologi— dari elit politik terutama elit partai politik terhadap aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI.

Temuan ini sekaligus mempertegas bahwa gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI bukanlah gerakan moral sebagaimana yang diklaim selama ini oleh para aktivisnya. Gerakan politik HMI, KAMMI,

FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI hanya menggunakan *statement moral force* untuk menarik simpati dan memperluas dukungan politiknya. Analisis terhadap gerakan HMI, KAMMI, FORKOT dan FKSMJ pada masa B.J. Habibie dan gerakan BEMI dan BEMSI pada masa Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa meskipun mengandung aspek moral sebagaimana tampak dalam *statement moral forcenya*, semua gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, dan gerakan BEMI dan BEMSI tetap mencakup gerakan politik.

Namun studi ini juga menemukan bahwa meskipun semua aksi-aksi demonstrasinya bersifat politik atau berkaitan dengan kekuasaan, tapi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI tetap mengakui kalau gerakannya merupakan gerakan moral. Gerakan moral yang dipahami oleh HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI adalah gerakan yang hanya semata-mata bertujuan memperbaiki keadaan sosial, politik, ekonomi dan budaya tanpa perlu menjadi bagian dari kekuasaan.

Berkaitan dengan gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik, studi ini menemukan bahwa gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, BEMI dan BEMSI pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid semuanya dilaksanakan melalui lima hal, yaitu: (1) langkah-langkah yang terorganisir; (2) tujuan gerakan yang jelas; (3) strategi dan cara-cara gerakan yang jelas; (4) gerakan dilakukan secara sadar; (5) gerakan berdasarkan pada analisis yang kuat.

Langkah-langkah yang terorganisir dan strategi yang jelas ditunjukkan oleh aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang semuanya dilakukan secara terencana dan berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuan politik yang jelas ditunjukkan oleh: (1) aksi-aksi demonstrasi HMI dan KAMMI yang dimaksudkan untuk mempertahankan Presiden B.J. Habibie hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2002; (2) aksi-aksi demonstrasi FORKOT dan FKSMJ yang dimaksudkan untuk menjatuhkan B.J. Habibie sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2002; (3) aksi-aksi demonstrasi BEMI yang dimaksudkan untuk mempertahankan Presiden Abdurrahman Wahid hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2004; (4) aksi-aksi demonstrasi BEMSI yang dimaksudkan untuk menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2004.

Gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI termasuk ke dalam gerakan politik atas dasar *moral force*. Sebab, dilakukan secara sadar seperti ditunjukkan oleh aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang semuanya berorientasi pada maksud dan tujuan, yaitu mempertahankan dan menjatuhkan Presiden B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Sedangkan berdasarkan analisis yang kuat ditunjukkan oleh aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang semuanya dirancang atas dasar perhitungan politik.

Studi ini menemukan faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi dasar terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa. Berkaitan dengan faktor internal yang bersifat obyektif, hasil studi ini mengungkap empat hal pokok, yaitu: (1) dukungan HMI dan KAMMI terhadap B.J. Habibie didasarkan pada penilaian bahwa B.J. Habibie bertindak cepat dalam melaksanakan sejumlah agenda reformasi. Misalnya, hanya dalam tempo 8 bulan B.J. Habibie berhasil mencabut UU Subversif, mencabut Dwi Fungsi ABRI, membebaskan tahanan politik dan narapidana politik, membuat kurang lebih 60 undang-undang termasuk undang-undang otonomi daerah yang waktu itu juga menjadi pusat perhatian elit politik lokal; (2) ketidakpuasan FORKOT dan FKSMJ terhadap B.J. Habibie didasarkan pada penilaian bahwa B.J. Habibie tidak memiliki keinginan politik (*political will*) mengadili Soeharto. Aksi-aksi FORKOT dan FKSMJ semakin radikal dalam menuntut mundur B.J. Habibie setelah B.J. Habibie mendeponir kasus Soeharto dengan pertimbangan Soeharto sakit dan sudah tua; (3) dukungan BEMI terhadap Abdurrahman Wahid didasarkan pada penilaiannya bahwa Abdurrahman Wahid telah melaksanakan sejumlah agenda reformasi, seperti mencabut TAP MPR tentang Tapol dan Napol eks-komunis, memperbolehkan kembali etnis Tionghoa merayakan hari-hari besarnya termasuk tradisi dan budayanya, mengangkat panglima TNI dari unsur TNI AL; (4) ketidakpuasan BEMSI terhadap Abdurrahman Wahid didasarkan pada penilaiannya bahwa Abdurrahman Wahid tidak serius memberantas KKN. Aksi-aksi BEMSI semakin radikal dalam menuntut mundur Abdurrahman Wahid setelah DPR melalui Memorandum I dan II menyatakan Abdurrahman Wahid terlibat dalam *Buloggate* dan *Bruneigate*.

Berkaitan dengan faktor internal yang bersifat subyektif, hasil studi ini juga mengungkap empat hal pokok yang menjadi dasar terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa, yaitu: (1) sikap politik HMI dan KAMMI yang mendukung B.J. Habibie didasarkan pada penilaiannya bahwa figur B.J. Habibie merupakan tokoh Islam yang reformis dan sensitif Islam yang dibuktikan oleh perannya dalam membangun ICMI, mencabut undang-undang subversif dan Dwi Fungsi ABRI; (2) sikap politik FORKOT dan FKSMJ yang menentang B.J. Habibie didasarkan pada penilaiannya bahwa B.J. Habibie merupakan “kaki-tangan” Soeharto yang dibuktikan oleh sikapnya menolak mengadili Soeharto; (3) sikap politik BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid didasarkan pada penilaiannya bahwa Abdurrahman Wahid merupakan tokoh reformis, tokoh pluralis dan tokoh sipil yang menentang Dwi Fungsi ABRI; (4) sikap politik BEMSI yang menolak Abdurrahman Wahid didasarkan pada penilaiannya bahwa Abdurrahman Wahid merupakan elit politik atau figur yang anti-demokrasi, anti-Islam, tidak reformis dan tidak memiliki komitmen dalam pemberantasan KKN.

Sedangkan mengenai faktor eksternal yang bersifat obyektif sebagai dasar terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa, hasil studi ini mengungkap dua hal pokok, yaitu: (1) adanya dukungan politik, ekonomi, dan psikologi dari elit politik. Dukungan elit politik umumnya dalam bentuk bantuan logistik dan dana operasional untuk aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI. Elit politik yang mendukung B.J. Habibie, seperti Adi Sasono (ICMI), Fadel Muhammad (Golkar) dan Yusril Ihza Mahendra (PBB) membantu aksi-aksi demonstrasi HMI dan KAMMI yang juga mendukung B.J. Habibie. Elit politik yang menentang B.J. Habibie, seperti Arifin Panigoro (PDIP) membantu aksi-aksi demonstrasi FORKOT dan FKSMJ yang juga menentang B.J. Habibie. Elit politik yang mendukung Abdurrahman Wahid, seperti Hasyim Wahid (PDIP), Muhaimin Iskandar (PKB) dan Muhyidin Arubusman (PKB) membantu aksi-aksi demonstrasi BEMI yang juga mendukung Abdurrahman Wahid. Elit politik yang menentang Abdurrahman Wahid, seperti Amien Rais (PAN), Arifin Panigoro (PDIP), Bachtiar Chamsjah (PPP), Kwik Gian Gie (PDIP) dan Ade Komaruddin (Golkar) membantu aksi-aksi demonstrasi BEMSI yang juga menentang Abdurrahman Wahid; (2) dukungan elit politik baik secara politik dan ekonomi

maupun secara psikologi terhadap aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI bukan hanya mempertajam polarisasi antara HMI-KAMMI dan FORKOT-FKSMJ pada masa B.J. Habibie atau antara BEMI dan BEMSI pada masa Abdurrahman Wahid, tetapi juga memperkuat gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI sebagai gerakan politik.

Sementara faktor eksternal yang bersifat subyektif yang menjadi dasar terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa, hasil studi ini mengungkap bahwa keterlibatan elit politik dalam mendukung aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI disebabkan oleh adanya kesamaan kepentingan politik dan ideologi antara aktivis mahasiswa dan elit politik. Dalam konteks kepentingan politik; (1) dukungan politik, ekonomi dan psikologi dari elit politik terhadap HMI dan KAMMI terutama berupa bantuan dana dan logistik hal itu terjadi setelah terdapat kesamaan dalam tujuan gerakan politik, yaitu sama-sama ingin mempertahankan B.J. Habibie hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2002; (2) dukungan politik, ekonomi dan psikologi dari elit politik terhadap FORKOT dan FKSMJ terutama berupa bantuan dana terjadi setelah terdapat kesamaan dalam tujuan gerakan politik, yaitu sama-sama menginginkan B.J. Habibie berhenti sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2002; (3) dukungan politik, ekonomi dan psikologi dari elit politik terhadap BEMI terutama berupa bantuan dana terjadi setelah terdapat kesamaan dalam tujuan gerakan politik, yaitu keduanya sama-sama ingin mempertahankan Abdurrahman Wahid hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2004; (4) dukungan politik, ekonomi dan psikologi dari elit politik terhadap BEMSI terutama berupa bantuan dana terjadi setelah terdapat kesamaan dalam tujuan gerakan politik, yaitu keduanya sama-sama menginginkan Abdurrahman Wahid berhenti sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2004.

Dalam konteks kepentingan ideologi; (1) dukungan politik, ekonomi dan psikologi elit politik pendukung B.J. Habibie terhadap HMI dan KAMMI terutama berupa bantuan dana terjadi karena keduanya sama-sama melihat B.J. Habibie sebagai personifikasi Islam; (2) dukungan politik, ekonomi dan psikologi elit politik penentang B.J. Habibie terhadap FORKOT dan FKSMJ terutama

berupa bantuan dana, terjadi karena keduanya sama-sama melihat B.J. Habibie masih bagian dari rezim Orde Baru dan sosok B.J. Habibie bukanlah tokoh pluralisme; (3) dukungan politik, ekonomi dan psikologi elit politik pendukung Abdurrahman Wahid terhadap BEMI terutama berupa bantuan dana dan logistik, terjadi karena keduanya sama-sama melihat figur Abdurrahman Wahid sebagai figur pluralisme; (4) dukungan politik, ekonomi dan psikologi elit politik penentang Abdurrahman Wahid terhadap BEMSI terutama berupa bantuan dana dan logistik terjadi karena keduanya sama-sama melihat sosok Abdurrahman Wahid sebagai figur anti-Islam dan pro-Yahudi, pro-Kristen, pro-Konghucu dan pro-Komunis.

Penelitian ini mengungkap bahwa polarisasi gerakan mahasiswa yang memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan politik dan ideologi justru dipertajam oleh keberhasilan elit politik memasukkan kepentingan politik dan ideologinya ke dalam gerakan mahasiswa. Kepentingan politik dan ideologi elit politik terutama elit partai politik masuk melalui berbagai ragam bentuk dukungan, seperti: (1) dukungan politik berupa simpati dan pembelaan terhadap perlakuan aparat yang represif; (2) dukungan ekonomi berupa bantuan dan, logistik, transportasi, dan penginapan; (3) dukungan psikologi berupa kehadiran di acara diskusi dan aksi demonstrasi sebagai pembicara.

Oleh karena itu sepanjang kepentingan politik dan ideologi menjadi bagian dari gerakan mahasiswa, maka pola hubungan aktivis mahasiswa dan elit politik selalu bersifat subordinat. Berbeda dengan hubungan aktivis mahasiswa dan elit politik pada gerakan mahasiswa Mei 1998 yang menganut pola koalisi, hubungan aktivis mahasiswa dan elit politik pada masa B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid tampak menganut pola subordinasi dan keduanya justru terlihat akrab atas kondisi yang tercipta dari pola subordinasi itu.

Meskipun demikian HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI tampak terlihat nyaman atas pola subordinasi itu. Sebab, selain beban materilnya berkurang, juga dukungan elit politik pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak mengandung beban moral karena tidak “mengusik” gerakan mahasiswa. Begitu pula sebaliknya, elit politik pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid juga nyaman dengan pola subordinasi itu,

karena selain HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI menyambut baik bantuannya, juga kepentingan politik dan ideologi elit politik mendapat tempat "persembunyian dan perlindungan" dari klaim gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI sebagai gerakan moral.

Hal lain yang diungkap dari penelitian ini adalah meskipun HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI mengaku didukung oleh elit politik pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid, dan sebaliknya, elit politik pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid mengaku telah mendukung HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak melihat adanya unsur saling "menunggangi". Baik HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI maupun elit politik pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid keduanya tidak melihat dukungan itu sebagai cara elit politik menunggangi gerakan mahasiswa yang sangat tabu di kalangan mahasiswa.

Meskipun demikian tidak berarti pola hubungan subordinat itu tanpa masalah. Studi ini mengungkap bahwa dukungan elit politik pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid terhadap gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI tidak hanya mempertajam polarisasi gerakan mahasiswa, tetapi juga membuat gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI bersifat politik. Begitu pula keterlibatan pihak kampus dalam mengatasi beban materil gerakan mahasiswa, seperti BEMI Universitas Tarumanagara, BEMSI Universitas Trisakti dan BEMSI Universitas Indonesia yang mendapat bantuan dari pihak Rektorat dengan alasan untuk menjaga independensi mahasiswa, tidak otomatis membuat gerakan mahasiswa terbebas dari kepentingan politik dan ideologi.

Polarisasi gerakan mahasiswa yang dipertajam oleh perbedaan kepentingan politik dan ideologi oleh para pendukung dan penentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI merupakan gerakan politik sekalipun menggunakan *statement moral force*. Disebut gerakan politik, karena semua aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingan politik dan ideologinya masing-masing,

sehingga bersifat politis. Temuan penelitian berupa dukungan elit politik terhadap aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang justru mempertajam polarisasi gerakan mahasiswa bukan hanya menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak lagi independen, tetapi juga memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa sulit eksis tanpa dukungan politik, ekonomi dan psikologi dari elit politik. Padahal secara politik dukungan elit politik sangat sulit terbebas dari kepentingan politik dan ideologi terutama bila hal itu berkaitan dengan kekuasaan.

Dengan demikian studi ini menegaskan tiga hal pokok, yaitu: (1) dukungan elit politik dalam aksi-aksi gerakan mahasiswa merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap polarisasi gerakan mahasiswa. Dukungan elit politik dalam aksi-aksi gerakan mahasiswa justru mempertajam polarisasi gerakan mahasiswa. Konflik antara HMI-KAMMI dan FORKOT-FKSMJ pada masa B.J. Habibie, dan konflik antara BEMI dan BEMSI pada masa Abdurrahman Wahid selain semakin lebar, juga aksi-aksi kedua belah pihak semakin bersifat politik sebagaimana temuan disertasi ini; (2) aksi-aksi gerakan mahasiswa yang bersifat politik tidak dapat berlangsung tanpa dukungan elit politik. Selama gerakan mahasiswa dimaksudkan untuk mendukung atau menjatuhkan kekuasaan maka selama itu pula gerakan mahasiswa tetap termasuk ke dalam gerakan politik; (3) aksi-aksi gerakan mahasiswa yang menggunakan *statement moral force* hanya dimaksudkan untuk menarik simpati dan memperluas dukungan politiknya hingga seluruh lapisan masyarakat terutama elit politik yang memiliki kesamaan kepentingan politik dan ideologis yang dapat memberinya dukungan politik, ekonomi dan psikologis.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut akhirnya dapat dijawab bahwa polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid menunjukkan berlangsungnya proses demokrasi dan demokratisasi yang dipenuhi konflik politik. Konflik politik yang berlangsung pada level elit politik dan level organisasi mahasiswa yang disebabkan oleh: (1) perbedaan persepsi terhadap figur B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden; (2) perbedaan pendapat tentang kebijakan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden; (3) keterlibatan elit politik yang memiliki

kepentingan politik dan ideologis dalam mendukung aksi-aksi gerakan mahasiswa.

Polarisasi gerakan mahasiswa juga menunjukkan adanya konflik politik karena mengandung tiga kriteria, yaitu: (1) adanya perbedaan pendapat; (2) memiliki keterkaitan dengan pejabat politik; (3) sifatnya yang mengarah kepada konflik kelompok. Ditemukannya penyebab polarisasi berupa: (1) faktor subyektif, yaitu perbedaan persepsi terhadap figur B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, seperti B.J. Habibie dinilai angkuh atau Abdurrahman Wahid dinilai tidak mampu karena cacat; (2) faktor obyektif, yaitu keterlibatan elit politik yang memiliki kepentingan politik dan ideologis dalam mendukung gerakan mahasiswa, mempertegas adanya konflik politik di dalam gerakan mahasiswa.

Selain itu polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid juga memperlihatkan tipologi gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik. Gerakan HMI dan KAMMI yang mendukung B.J. Habibie, gerakan FORKOT dan FKSMJ yang menentang B.J. Habibie, gerakan BEMI yang mendukung Abdurrahman Wahid, gerakan BEMSI yang menentang Abdurrahman Wahid semuanya termasuk ke dalam gerakan politik. Disebut gerakan politik, karena semua aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FKSMJ, FORKOT, BEMI dan BEMSI tidak lagi terbatas pada *statement moral force*. HMI, KAMMI, FKSMJ, FORKOT, BEMI dan BEMSI percaya bahwa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak diubah hanya dengan cara dihimbau dan diingatkan melalui *statement moral force*, sehingga perlu bekerjasama dengan elit politik yang memiliki kesamaan kepentingan politik dan ideologi untuk bersama-sama mendukung atau menjatuhkan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Gerakan politik HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI dapat dicermati dari aksi-aksi demonstrasinya yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid yang tidak lagi sebatas berorientasi pada kepentingan umum. Melainkan pada kepentingan untuk mempertahankan dan mengganti pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Studi ini tidak menemukan adanya tipologi gerakan moral mahasiswa sebagaimana studi Arbi Sanit, Suwondo dan Muridan S. Widjojo. Studi ini menemukan gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI sebagai gerakan politik, karena sudah direncanakan sejak awal untuk mendukung (mempertahankan) dan menentang (menjatuhkan) kekuasaan politik B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI termasuk ke dalam gerakan politik setelah dicirikan oleh dua hal, yaitu: (1) isu politik yang disosialisasikan membuat ruang pergerakannya semakin luas, sehingga dapat melibatkan semua kelompok kepentingan; (2) menyatunya berbagai kekuatan politik, terutama massa kampus dan massa di luar kampus. Kontak-kontak politik langsung aktivis HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI dengan elit-elit politik tidak hanya sebatas memainkan peranan penting dalam membentuk sikap dan keyakinan politik para aktivis mahasiswa, tetapi juga telah mendorongnya untuk melakukan aksi-aksi massa yang terencana dengan tujuan mempertahankan atau mengganti kekuasaan politik B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Selain itu polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid juga memperlihatkan adanya elit politik (elit penentu) yang mencari pengaruh berdasarkan kepentingannya masing-masing dan fenomena elit penentu yang selalu mencakup sejumlah kelompok yang terlibat dalam kerjasama, kompetisi dan konflik. Elit penentu yang dimaksud itu meliputi; (1) elit politik, seperti Sri Sultan Hamengkubowono X, Gubernur, aristokrat dan elit partai berpengaruh yang menentang B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-P) dan Abdurrahman Wahid (Ketua Dewan Syuro PKB) yang menentang B.J. Habibie, Marsillam Simanjuntak, Muhaimin Iskandar, Bondan Gunawan, Wimar Witoelar, Mahfud MD, Muhyidin Arubusman dan Khofifah Indar Parawansa yang mendukung Abdurrahman Wahid, Amien Rais dan Akbar Tanjung yang menentang Abdurrahman Wahid; (2) elit ekonomi, seperti Fadel Muhammad yang mendukung B.J. Habibie, Arifin Panigoro yang menentang B.J. Habibie, Fuad Bawazier dan Arifin Panigoro yang menentang Abdurrahman Wahid; (4) pemimpin militer, seperti Wiranto dan Kivlan Zen yang mendukung B.J. Habibie, Kemal Idris, Ali Sadikin dan Solichin GP yang

menentang B.J. Habibie, Agus Wirahadikusumah dan Saurif Kadi yang mendukung Abdurrahman Wahid, Endriartono Sutarto dan Fachrul Razi yang menentang Abdurrahman Wahid; (5) para pemimpin moral, seperti Malik Fajar, Nurcholis Madjid, Romo Sandyawan yang menentang B.J. Habibie, Hasyim Muzadi, Said Agil Siradj yang mendukung Abdurrahman Wahid dan Malik Fajar, Din Syamsuddin yang menentang Abdurrahman Wahid; (6) budayawan, seperti Ratna Sarumpaet dan Eros Djarot yang menentang B.J. Habibie, Emha Ainun Nadjib dan Jaya Suprana yang mendukung Abdurrahman Wahid; (7) intelektual seperti Faisal Basri yang menentang B.J. Habibie, Sri Bintang Pamungkas, Sri Edi Swasono dan Karlina Leksono yang menentang B.J. Habibie, Thamrin Amal Tomagola yang mendukung Abdurrahman Wahid, Syahrir yang menentang Abdurrahman Wahid. Juga wakil-wakil kelompok kepentingan sosial baru, seperti Ahmad Sumargono (KISDI), Adi Sasono (ICMI), Eggi Sudjana (PPMI) dan Fadly Zon (IPS) yang mendukung B.J. Habibie.

Semua elemen elit penentu itu meskipun dibatasi oleh: (1) aturan hukum sebagai pernyataan kesatuan moral masyarakat secara keseluruhan; (2) kekuatan-kekuatan sosial sebagai wakil berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, namun secara posisional dan personal tetap berpengaruh secara langsung baik terang-terangan maupun tersamar menggunakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI dalam mendukung dan menentang Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid.

Sikap HMI, KAMMI, FORKOT dan FKSMJ pada masa B.J. Habibie, dan BEMI dan BEMSI masa Abdurrahman Wahid yang lebih memilih melakukan pola hubungan subordinat dengan elit politik ketimbang pola hubungan koalisi atau kemitraan yang justru mengakibatkan terjadinya polarisasi gerakan mahasiswa didasarkan pada pengalamannya menjatuhkan Soeharto. HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI tampak tidak menyadari bahwa tidak adanya polarisasi gerakan pada masa kejatuhan Soeharto, karena disebabkan dua hal, yaitu: (1) umumnya kelompok elit politik tidak mengalami fragmentasi; (2) hubungan kelompok gerakan mahasiswa dan kelompok elit politik cenderung bersifat koalisi (mitra koalisi). Sebaliknya, kelompok elit politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid yang memiliki akses ke

dalam gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI justru terpecah ke dalam blok-blok kepentingan politik dan ideologis.

Oleh sebab itu, berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut, dapat pula ditegaskan dua potensi bahaya dari pilihan gerakan mahasiswa yang cenderung menganut pola hubungan subordinat, yaitu; (1) pengalaman gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang bersifat politik pada masa B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid potensial dihujat oleh masyarakat bila ke depan para aktivis mahasiswa tidak melakukan otokritik; (2) dalam jangka panjang, gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang bersifat politik dapat merusak ciri mahasiswa sebagai intelektual untuk sebuah fungsi agen perubahan sosial yang bergerak atas dasar moral; (3) sikap HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang menolak bantuan elit politik tertentu tidak dapat menjadi alasan untuk mengatakan bahwa gerakan mahasiswa merupakan gerakan moral. Sebab, bantuan elit politik hanyalah salah satu metode untuk mempengaruhi gerakan mahasiswa. Metode lainnya, seperti kontak-kontak atau lobby-lobby politik juga dapat dipilih oleh elit politik untuk mempengaruhi gerakan mahasiswa dan menyalurkan kepentingannya.

## **7.2. Implikasi Teoritik**

Signifikansi studi ini adalah mengkonfirmasi asumsi teoritis Maswadi Rauf, dan Larry Diamond mengenai persyaratan-persyaratan demokrasi. Persyaratan-persyaratan demokrasi menurut Maswadi Rauf mencakup: (1) kebebasan berbicara dan berkumpul atau berserikat; (2) pemilu yang bebas, terbuka, adil, jujur, berskala dan kompetitif; (3) pemerintah yang tergantung pada parlemen. Sedangkan persyaratan-persyaratan demokrasi menurut Larry Diamond mencakup: (1) kebebasan berbicara; (2) kebebasan pers; (3) kebebasan berserikat; (4) tatanan dimana terdapat kompetisi dan partisipasi secara bermakna.

Hasil studi terhadap polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang mengungkap aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI sebagai gerakan politik menegaskan bahwa asumsi teoritis Maswadi Rauf dan Larry Diamond tentang persyaratan-persyaratan demokrasi dapat digunakan untuk menjelaskan polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie

dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai indikator demokrasi. Berlakunya asumsi teoritis Maswadi Rauf dan Larry Diamond pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sangat berkaitan dengan aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI untuk mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid merupakan perwujudan dari: (1) kebebasan berbicara dan berkumpul; (2) pemilu yang bebas, terbuka, adil, jujur, berskala dan kompetitif; (3) pemerintah yang tergantung pada parlemen; (4) majelis sebagai kebutuhan minimum dalam tatanan di mana terdapat kompetisi dan partisipasi secara bermakna.

Studi ini juga mengkonfirmasi asumsi teoritis Maswadi Rauf tentang demokratisasi. Menurut Maswadi Rauf demokratisasi berjalan melalui proses yang dicirikan oleh tiga hal, yaitu: (1) demokratisasi merupakan proses yang terus menerus, tidak pernah selesai; (2) demokratisasi berjalan secara evolusioner, bertahap dan perlahan-lahan, bukan cepat atau revolusioner; (3) demokratisasi berjalan melalui proses perubahan secara persuasif. Demokratisasi berjalan dalam beberapa tahapan, diantaranya yaitu: tahap transisi dan tahap liberalisasi awal. Pada tahap transisi telah berlangsung pemerintahan dengan pemimpin baru yang berkerja atas dasar legitimasi yang baru. Namun tahap ini dapat terjadi kombinasi di antara beberapa hal, yaitu: (1) kritisisme dan perlawanan dari luar rezim; (2) rezim mengalami perpecahan internal; (3) angkatan bersenjata mengalami perpecahan atau perubahan orientasi politik; (4) rezim menghadapi krisis ekonomi dan atau politik yang semakin sulit dikelola; dan (5) tuntutan-tuntutan perubahan semakin kuat.

Hasil studi terhadap polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang mengungkap aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang bertujuan mempertahankan dan menjatuhkan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa asumsi teoritis Maswadi Rauf tentang demokratisasi dapat digunakan untuk menjelaskan gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang didukung oleh elit politik terutama elit partai politik sebagai hasil konsolidasi politik dalam masa transisi, yaitu pasca

jatuhnya rezim Orde Baru. Berlakunya asumsi teoritis Maswadi Rauf dapat dilihat dari proses demokratisasi yang berjalan dicirikan oleh tiga hal, yaitu: (1) demokratisasi yang berjalan secara terus menerus, mulai dari jatuhnya Soeharto hingga kepada kejatuhan Abdurrahman Wahid; (2) demokratisasi yang berjalan secara evolusioner, yang dapat dilihat dari proses pergantian kekuasaan secara prosedural dan konstitusional tanpa melalui revolusi; (3) demokratisasi yang berjalan secara persuasif dapat dilihat dari penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Demokratisasi pada tahap transisi telah berlangsung pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie yang bekerja atas dasar legitimasi yang baru namun pada masa B.J. Habibie terjadi kombinasi di antara beberapa hal, yaitu: (1) kritisisme dan perlawanan dari gerakan mahasiswa dan elit politik; (2) dukungan terhadap B.J. Habibie mengalami perpecahan; (3) ABRI mengalami perpecahan atau perubahan orientasi politik; (4) B.J. Habibie menghadapi krisis ekonomi dan atau politik yang semakin sulit dikelola; dan (5) tuntutan-tuntutan perubahan semakin kuat.

Berikutnya, studi ini mengkonfirmasi asumsi teoritis Maswadi Rauf mengenai konflik politik. Menurut Maswadi Rauf konflik politik terjadi karena mengandung tiga unsur, yaitu: (1) adanya perbedaan pendapat; (2) memiliki keterkaitan dengan pejabat politik atau pejabat pemerintahan; (3) sifatnya yang mengarah kepada konflik kelompok.

Hasil studi terhadap polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang mengungkap adanya konflik politik antara HMI-KAMMI dan FORKOT-FKSMJ pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan konflik politik antara BEMI dan BEMSI masa pemerintahan Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa teori konflik politik dari Maswadi Rauf dapat menjelaskan polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Ditemukannya penyebab polarisasi berupa: (1) faktor subyektif, yaitu perbedaan persepsi terhadap figur B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, seperti B.J. Habibie yang dinilai angkuh atau Abdurrahman Wahid memiliki ketidakmampuan akibat cacat dan sakitnya; (2) faktor obyektif, yaitu adanya kebijakan-kebijakan politik B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid yang

kontraproduktif, seperti kebijakan referendum Timor Timur untuk B.J. Habibie dan kebijakan pembebasan Tapol dan Napol eks-komunis dan harmonisasi hubungan dengan Israel untuk Abdurrahman Wahid, serta keterlibatan elit politik yang memiliki kepentingan politik dan ideologis dalam mendukung gerakan mahasiswa menunjukkan berlakunya asumsi teoritis Maswadi Rauf tentang dasar dan sebab-sebab konflik.

Dasar konflik dari polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid adalah proses demokrasi yang dipenuhi konflik politik yang berlangsung pada level elit politik dan level organisasi mahasiswa yang disebabkan oleh: (1) perbedaan persepsi terhadap figur B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden; (2) perbedaan pendapat tentang kebijakan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden; (3) keterlibatan elit politik yang memiliki kepentingan politis dan ideologis dalam mendukung aksi-aksi gerakan mahasiswa.

Selanjutnya, studi ini juga mengkonfirmasi teori gerakan massa dari Eric Hoffer dan tipologi gerakan politik mahasiswa dari studi Philip G. Altbach, Menurut Eric Hoffer ciri gerakan massa, yaitu: (1) kebangkitan dan kerelaan para para anggotanya untuk berkorban sampai mati; (2) kecenderungan untuk beraksi secara kompak; (3) memiliki fanatisme; (4) antusiasme; (5) harapan berapi-api; (6) kebencian; (7) intoleransi; (8) kepercayaan buta; (9) kesetiaan tunggal. Eric Hoffer membagi sifat gerakan massa ke dalam dua tipe gerakan, yaitu: (1) gerakan sebagai suatu reaksi spontan; sebab-sebab yang tidak begitu jelas, menggunakan jaringan yang tidak begitu tertata, dan respon terhadap suatu keadaan tertentu; (2) gerakan sebagai langkah-langkah terorganisir dengan tujuan, strategi dan cara-cara yang dirumuskan secara jelas, sadar dan didasarkan kepada suatu analisis yang kuat. Sedangkan Philip G. Altbach melihat gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik. Philip G. Altbach berdasarkan kajiannya tentang gerakan mahasiswa Korea Selatan, Muangthai, Afganistan, Iran dan Amerika Serikat melihat gerakan mahasiswa sebagai gerakan politik.

Hasil studi terhadap polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang mengungkap bahwa aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan

BEMSI termasuk ke dalam gerakan politik moral menegaskan bahwa tipologi gerakan politik mahasiswa dari Philip G. Altbach dapat digunakan untuk menjelaskan polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Berlakunya tipologi gerakan politik mahasiswa dari Philip G. Altbach sangat berkaitan dengan tujuan dari aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI untuk mengubah struktur dan kebijakan dengan cara mempertahankan atau menjatuhkan kekuasaan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Studi ini juga mengkonfirmasi teori ideologi politik dari Deliar Noer dan Rober E. Lane. Deliar Noer melihat bahwa ideologi tidak hanya tumbuh dari kepentingan dan pemikiran manusia, tetapi juga mendapat pengaruh dari agama, lingkungan dan tradisi serta pemikiran yang datang dari luar. Deliar Noer melihat ajaran agama yang sering dijabarkan sedemikian rupa merupakan suatu ideologi yang merupakan campuran antara kepentingan dan pemikiran manusia yang dipengaruhi agama. Sementara ideologi menurut Robert E. Lane bukan hanya merupakan suatu argumen, tetapi juga dimaksudkan sebagai pandangan yang mendorong dan melawan pandangan lain, ideologi juga meliputi program untuk mempertahankan, mengubah ataupun menghapuskan lembaga-lembaga sosial tertentu.

Hasil studi terhadap polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang mengungkap adanya faktor ideologi dalam gerakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI untuk mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa asumsi teoritis Deliar Noer dapat digunakan untuk menjelaskan konflik antara HMI-KAMMI (pendukung B.J. Habibie) melawan FORKOT-FKSMJ (penentang B.J. Habibie), konflik antara BEMI (pendukung Abdurrahman Wahid) melawan BEMSI (penentang Abdurrahman Wahid).

Berlakunya asumsi teoritis Deliar Noer dan Robert E. Lane dapat dijelaskan dari ideologi yang dianut oleh: (1) HMI dan KAMMI yang merupakan campuran antara kepentingan dan pemikiran yang dipengaruhi Islam; (2) FKSMJ dan FORKOT yang merupakan campuran antara kepentingan (rakyat) dan pemikiran (Marxis) yang dipengaruhi oleh lingkungan dan tradisi dari luar (gerakan

mahasiswa Korea, Prancis dan Philipina); (3) BEMI yang merupakan campuran antara kepentingan (rakyat) dan pemikiran (Marxis) yang dipengaruhi oleh lingkungan dan tradisi (Liberalisme); (4) BEMSI yang merupakan campuran antara kepentingan dan pemikiran yang dipengaruhi Islam. Ideologi yang dianut masing-masing bukan hanya merupakan suatu argumen untuk membenarkan gerakannya, tetapi juga dimaksudkan sebagai pandangan yang mendorong dan melawan pandangan yang bertentang dengannya, serta program untuk mempertahankan, mengubah ataupun menghapuskan lembaga-lembaga sosial yang ada di bawah pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Terakhir, studi ini juga mengkonfirmasi asumsi teoritis Suzanne Keller tentang peranan elit politik. Menurut Suzanne Keller hanya kelompok-kelompok tertentu saja di mana keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya mempunyai akibat-akibat penting dan menentukan untuk kebanyakan anggota masyarakat. Kelompok-kelompok ini disebutnya sebagai elit penentu yang terdiri dari para pemimpin politik, ekonomi dan militer, para pemimpin moral, budayawan, dan kaum intelektual.

Hasil studi terhadap polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang mengungkap aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang sudah tergolong ke dalam gerakan politik dan didukung oleh elit politik terutama elit partai politik menegaskan bahwa asumsi teoritis Suzanne Keller tentang adanya kelompok-kelompok tertentu saja di mana keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya mempunyai akibat-akibat penting dan menentukan untuk kebanyakan anggota masyarakat dapat digunakan untuk menjelaskan gerakan politik HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI.

Polarisasi gerakan mahasiswa pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang mengungkap aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSMJ, BEMI dan BEMSI yang didukung oleh partai politik memperlihatkan fenomena elit penentu yang mencakup sejumlah kelompok politik yang terlibat dalam kerjasama, kompetisi dan konflik yang mencari pengaruh berdasarkan kepentingannya masing-masing.

Elit penentu yang dimaksud Suzanne Keller adalah elit politik yang mencakup: (1) para pemimpin politik yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid; (2) ekonomi yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid; (3) militer yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid; (4) para pemimpin moral yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid; (5) budayawan yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid; (6) kaum intelektual yang mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid.

Semua elemen elit penentu itu meskipun dibatasi oleh: (1) aturan hukum sebagai pernyataan kesatuan moral masyarakat secara keseluruhan; (2) kekuatan-kekuatan sosial sebagai wakil berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, namun secara posisional tetap berpengaruh secara langsung baik terang-terangan maupun secara tersamar menggunakan HMI, KAMMI, FORKOT, FKSM, BEMI dan BEMSI sebagai kekuatan politik dalam mempengaruhi kebijakan, mendukung atau menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Pengaruh elit penentu dalam aksi-aksi demonstrasi HMI, KAMMI, FORKOT, FKSM, BEMI dan BEMSI untuk mendukung dan menentang B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid terjadi melalui kontak-kontak pribadi secara langsung dan lobby-lobby politik antara elit politik dan aktivis gerakan mahasiswa.

Dengan demikian implikasi teoritik yang dihasilkan dari temuan studi ini adalah: (1) gerakan mahasiswa di setiap masa pemerintahan selalu menganut tipologi gerakan politik; (2) tipologi gerakan moral mahasiswa tetap tidak dimungkinkan sekalipun tidak melibatkan dukungan elit politik. Sebab, gerakan politik mahasiswa selalu terkait dengan kepentingan politik dan ideologi aktivis serta organisasi mahasiswa; (3) hubungan aktivis mahasiswa dan elit politik dalam gerakan politik mahasiswa cenderung menganut pola hubungan subordinat dan bersifat personal; (4) *statement moral force* dalam gerakan mahasiswa hanya dimaksudkan untuk menarik simpati dan memperluas dukungannya.

Berdasarkan temuan-temuan dan implikasi teoritis tersebut, studi ini mengajukan suatu asumsi teoritis baru, yaitu: bahwa gerakan mahasiswa yang menggunakan strategi gerakan moral yang dimaksudkan untuk menarik simpati

dan dukungan, serta untuk memperluas dukungan politiknya dalam rangka memperkuat tipologi gerakan politik yang dianutnya sangat sulit untuk menghindari dari polarisasi. Polarisasi gerakan mahasiswa menjadi tajam setelah mendapat dukungan dari elit politik terutama partai politik. Sedangkan kesulitan penyatuan gerakan mahasiswa selain disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan politik dan ideologi yang dianut oleh aktivis mahasiswa, juga oleh perbedaan kepentingan politik dan ideologi dari elit politik yang memberi dukungan politik, ekonomi dan psikologis.

Studi ini juga mengajukan perspektif teoritis baru dalam konteks gerakan politik mahasiswa, yaitu: (1) meskipun gerakan politik sangat sulit dihindari oleh gerakan mahasiswa, namun polarisasi gerakan mahasiswa tetap dapat dihindari dengan cara menghilangkan perbedaan kepentingan politik dan ideologi di level aktivis mahasiswa dan organisasi; (2) meskipun persamaan kepentingan politik dan ideologi dapat mempermudah penyatuan gerakan mahasiswa, namun dapat pula berakibat pada mengecilnya dukungan elemen masyarakat terhadap gerakan mahasiswa yang justru dapat membuat gerakan mahasiswa kembali mempertajam perbedaan kepentingan politik dan ideologi; (3) *statement moral force* yang ada dalam gerakan mahasiswa menjadi dasar legitimasi mahasiswa untuk memperluas dukungan politiknya dan menjadi dasar elit politik untuk mendukung gerakan mahasiswa di satu pihak, dan polarisasi gerakan mahasiswa yang diakibatkan oleh dasar legitimasi moral itu dan dukungan elit politik di pihak lain.

Studi ini menegaskan bahwa untuk mempertahankan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral harus dibebaskan dari ketergantungan finansial dari elit politik walaupun secara ideologi dan psikologi antara aktivis mahasiswa dan elit tidak dapat dipisahkan.